

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terdapat dua prosedur pengeluaran kas untuk mendanai kegiatan yaitu prosedur pengeluaran kas kecil dan prosedur pengeluaran kas melalui bank. Masing-masing prosedur ini melibatkan beberapa fungsi, untuk pengeluaran kas kecil, fungsi yang terkait yaitu bendahara pengeluaran, PPTK, kasir dan PUMK. Sedangkan untuk pengeluaran kas melalui bank, fungsi yang terkait yaitu Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran, PPK, Kuasa BUD dan Bank BPD. Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang bertugas mengatur uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Kasir merupakan pegawai penatausahaan keuangan yang tugasnya menerima uang dari bendahara pengeluaran kemudian menyerahkan uang tersebut kepada PUMK. PUMK adalah pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditetapkan oleh PA yang bertugas mengelola urusan administrasi keuangan. PA merupakan kepala dinas yang memegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. PPK bertugas sebagai verifikator SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, lalu menyiapkan rancangan SPM yang akan diterbitkan oleh PA. Kuasa BUD bertugas menerbitkan SP2D, kemudian Bank BPD sebagai perantara pencairan dana.

Prosedur pengeluaran kas kecil yang terjadi di dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yaitu mulanya PPTK mengajukan SPP kepada bendahara pengeluaran, lalu bendahara pengeluaran mengambil

uang dari bank untuk diserahkan kepada kasir kemudian kasir menyerahkan uang kepada PUMK. Untuk prosedur pengeluaran kas melalui bank mulanya bendahara mengajukan SPP berdasarkan SPD kepada PPK, dokumen SPP diverifikasi oleh PPK dengan cara diteliti kebenaran dan kelengkapannya. Setelah dokumen SPP dinyatakan benar dan lengkap, PPK menyiapkan dokumen berupa SPM. Pengguna Anggaran kemudian menerbitkan SPM yang sebelumnya sudah disiapkan PPK kemudian PA mengajukan SPM kepada Kuasa BUD. Kuasa BUD kemudian menerbitkan SP2D setelah itu kuasa BUD menyerahkan SP2D ke Bank BPD, kemudian Bank BPD mentransfer ke rekening atas nama penerima dan besaran dana sesuai dengan yang tertera dalam SP2D.

Untuk mengawasi jalannya prosedur pengeluaran kas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjadikan aliran kas sebagai sistem pengendalian agar pengeluaran kas lebih terkendali. Aliran kas dibentuk berdasarkan Dokumen Pengeluaran Anggaran yang dijabarkan per bulan. Pedoman penyusunan DPA adalah SHBJ atau Standar Harga Barang dan Jasa. Harga yang termasuk dalam SHBJ adalah harga toko ditambah keuntungan ditambah pajak. Setiap nominal pengeluaran yang diajukan dalam SPP, oleh bendahara pengeluaran selalu dicocokkan nominalnya dengan yang ada di aliran kas. Hal ini dilakukan agar pengeluaran yang terjadi sesuai dengan anggaran.

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengeluaran kas kecil yaitu Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan kuitansi. SPP diajukan oleh PPTK untuk memperoleh kas guna mendanai kegiatan yang akan dilaksanakannya. Sedangkan kuitansi digunakan sebagai bukti penyerahan uang oleh kasir kepada PUMK. Untuk pengeluaran kas melalui bank, dokumen yang digunakan yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Guna mendukung dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas kecil, kasir membuat catatan untuk mencatat kas yang diterima dari bendahara pengeluaran dan mencatat kas yang

diserahkan kepada PUMK. Sedangkan catatan yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas melalui bank yaitu register. Register berguna untuk membantu pencocokan data dan nominal pengeluaran kas dengan dokumen SPP, SPM dan SP2D. Setiap pengeluaran kas melalui bank juga di input ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sehingga secara otomatis jurnal pengeluaran kas terbentuk di dalam aplikasi tersebut.

B. Pengetahuan dan Wawasan yang Diperoleh dari Hasil Kajian

Selama pelaksanaan penelitian tugas akhir, penulis mendapatkan banyak informasi, wawasan baru dan pengalaman baru mengenai praktik penatausahaan keuangan terutama pengeluaran kas pada instansi pemerintahan daerah. Penulis memperoleh informasi dan wawasan baru terkait bagaimana pemerintahan daerah menjalankan prosedur pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan yang sudah disusun, serta mengetahui fungsi-fungsi yang ada di dinas dan tugasnya dalam menjalankan prosedur pengeluaran kas.

Melalui penelitian tugas akhir ini penulis juga dapat mengetahui dokumen yang digunakan dan catatan yang dibuat dalam prosedur pengeluaran kas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Selain itu, penulis juga memperoleh wawasan tentang sistem pengendalian internal yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk mengontrol setiap pengeluaran kas agar sesuai dengan anggaran yang telah disusun.